

Analisis

Bansos di Tahun Politik

Dr W Riawan Tjandra SH MHum



Kedaulatan Rakyat

Kamis, 6 Februari 2014

PARA elite politik di negeri ini sepertinya tak jera untuk bermain-main dengan politik kedermawanan. Yakni mencabut dimensi aksiologis dari praktik kedermawanan sosial dan menempatkannya dalam percaturan politik transaksional dan permainan administratif kebijakan bantuan bagi warga masyarakat yang dikategorikan miskin. Kenaikan anggaran dana bantuan sosial (bansos) secara signifikan dalam APBN 2014 menjadi Rp 75 triliun dari angka sebelumnya Rp 69 triliun (2013) dan Rp 45 triliun (2012), perlu diwaspadai.

Kisruh seputar pendataan administratif yang berbeda antara jumlah nil warga masyarakat yang berhak dan yang menerima dana

bansos, banyak terjadi. Hadimya bansos lekat dengan pencitraan politik, sasaran pendanaan yang bias bahkan sering dipalsukan untuk kepentingan dana politik bagi para politisi dalam pemilu/pemilukada. Realita yang mengiringi hadimya bansos selama ini telah menjadi potret suram anggaran negara/daerah yang menjadi pos-pos anggaran minim akuntabilitas. Pemerintah telah berupaya memperbaiki mekanismenya melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Namun sulit dibantah bahwa bansos di masa lalu telah menjadi citra palsu yang menopengi realitas melalui norma hukum yang menjadi dasar penganggaran yang seolah-olah berpihak kepada kelompok miskin.

Upaya untuk menciptakan kekuasaan komunikatif melalui APBN atas nama kedermawanan sosial bisa mengalami kegagalan dan justru memunculkan defisit kedermawanan. Karena hegemoni lapisan atas dalam mendominasi komunikasi antarlapisan atas dan bawah tersebut untuk mendorong citra politiknya di tahun politik.

Dalam perspektif regulasi pendanaan bansos, saat ini Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah diamandemen melalui Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Penyempurnaan mekanisme pendanaan bansos tersebut terutama mencakup transparansi dan akuntabilitas terkait subyek pener-

ima dana, kriteria dan mekanisme pertanggungjawaban. Dasar hukum dalam merealisasikan penganggaran dana bansos tersebut diperjelas posisinya, yaitu melalui penetapan (*beschikking*) kepala daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penegasan kerangka hukum pendanaan bansos itu dimaksudkan untuk menarik batas pertanggungjawaban yang jelas dalam kebijakan pendanaan bansos di daerah.

Aliran dana bansos yang harus mengikuti skema program dan kegiatan dalam belanja hibah yang melekat pada konstruksi belanja tidak langsung dalam APBD, seharusnya mempermudah pelacakan aliran dana tersebut kepada target-target penerimanya. Elite politik yang terbukti mengkomodisasikan dana bansos harus diberi sanksi tegas secara administratif (dicoret dari daftar caleg), secara pidana (diproses melalui tindak pidana korupsi) dan secara sosial (didelegitimasi secara sosial). Sungguh tak layak bagi calon pemimpin, jika untuk berkuasa harus berkedok kedermawanan sosial agar bisa bertahta di kursi panas politik. Ironis, jika kemudian pada saatnya akan menjadikannya pesakitan sebagai penjahat politik karena syahwat menjadi pejabat.

(Penulis adalah Pengajar pada FH Universitas Alma Java Yogyakarta)-f